



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 28) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 2.051.315.789.879,06 bertambah sejumlah Rp. 587.600.759.840,00 sehingga menjadi Rp. 2.638.916.549.719,06 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 1.935.433.574.999,70	
b. Bertambah	<u>Rp. 441.384.169.205,42</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.376.817.744.205,12
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 2.051.315.789.879,06	
b. Bertambah	<u>Rp. 587.600.759.840,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 2.638.916.549.719,06
Defisit setelah perubahan		Rp. (262.098.805.513,94)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 261.082.215.176,92	
2) Bertambah	<u>Rp. 496.319.736.427,88</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 757.401.951.604,80

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	145.200.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	245.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	512.201.951.604,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	250.103.146.090,86

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.320.910.477.714,05
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>409.735.836.305,82</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	1.730.646.314.019,87

## b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	442.315.671.461,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	442.315.671.461,00

## c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1) Semula	Rp.	172.207.425.824,65	
2) Bertambah	Rp.	<u>31.648.332.899,60</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		203.855.758.724,25

## (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.207.320.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>380.117.906.151,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		1.587.437.906.151,00

## b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	37.842.066.800,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>21.395.467.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		59.237.533.800,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	34.623.740.018,36	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.712.463.154,82</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		41.336.203.173,18

## d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	41.124.670.895,69	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.510.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		42.634.670.895,69

## (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	87.409.445.461,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		87.409.445.461,00

## b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	353.067.906.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		353.067.906.000,00

## c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	1.838.320.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		1.838.320.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  
dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 98.259.035.064,65

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 24.591.303.251,60

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi

Dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 122.850.338.316,25

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 46.475.297.760,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 00,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Rp. 46.475.297.760,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 4.188.540.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.057.029.648,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 11.245.569.648,00

## d. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp.	23.284.553.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		23.284.553.000,00

## e. Dana Jamkesmas

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00

## f. Dana Kapitasi Askes

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00

## g. Dana Jampersal

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00

h. Dana JKBM			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00
i. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00
j. Hibah			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00
k. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.		00,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.230.344.837.571,06
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>200.806.918.863,00</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 1.431.151.756.434,06

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	820.970.952.308,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>386.793.840.977,00</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.207.764.793.285,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	821.435.761.896,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>66.134.724.545,53</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 887.570.486.441,53

## b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	00,00
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 00,00

## c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	660.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>250.000.000,00</u>

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 910.000.000,00

## d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	42.922.219.575,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.531.996.223,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 45.454.215.798,00

## e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	39.863.343.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.500.315.648,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 49.363.658.648,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 133.257.151.226,10

2) Bertambah Rp. 78.808.917.590,56

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 212.066.068.816,66

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa

1) Semula Rp. 189.206.361.873,96

2) Bertambah Rp. 43.580.964.855,91

Jumlah bantuan keuangan kepada provinsi/

Kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 232.787.326.729,87

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 00,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	55.540.065.850,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.641.984.099,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		69.182.049.949,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	325.505.307.001,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>105.006.754.956,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		430.512.061.957,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	439.925.579.457,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>268.145.101.922,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		708.070.681.379,00

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	261.082.215.176,92	
2) Bertambah	Rp.	<u>496.319.736.427,88</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 757.401.951.604,80

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	145.200.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>100.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 245.200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	261.082.215.176,92	
2) Bertambah	Rp.	<u>496.319.736.427,88</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 757.401.951.604,80

## b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

## c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

## d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

## e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

## f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		00,00

## (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

## a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	145.200.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		245.200.000.000,00

## b. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		00,00

## c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		00,00

## d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

## e. Penguatan Modal Dana Bergulir

1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	00,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 17 September 2012

Plh. BUPATI BADUNG  
WAKIL BUPATI,

I KETUT SUDIKERTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 6